

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi merupakan masalah krusial bagi semua negara, setiap negara akan berusaha demi terciptanya pembangunan ekonomi yang maju dan berhasil. Keberhasilan suatu negara terutama di Indonesia dapat dilihat dari tiga pelaku ekonomi yang terdiri dari pelaku negara, pelaku swasta dan pelaku koperasi. Jika ketiga pelaku ekonomi tersebut berhasil, maka akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan pembangunan di segala bidang lebih cepat.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di segala bidang tidak terlepas dari peran masyarakat khususnya disektor perekonomian, sebab keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah menempatkan ekonomi nasionalnya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sebagai perwujudannya adalah dengan adanya gerakan ekonomi koperasi di kalangan masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah. Setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien.

Menurut UU No 25 tahun 1992 Pasal 7 yang berbunyi : Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi sedangkan koperasi sekunder didirikan paling sedikit oleh tiga koperasi primer. Primkop Kartika Benteng Emas Palembang merupakan koperasi konsumen atau koperasi konsumsi dimana koperasi ini memiliki tujuan untuk menyediakan anggotanya dari barang

konsumsi dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang baik. Dan laba yang diperoleh atau biasa disebut dengan istilah sisa hasil usaha dibagi ke anggota menurut perbandingan jumlah pembelian di setiap anggota.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat 1 : “Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Pendapatan atau hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: Cadangan koperasi, Jasa anggota, Dana Pengurus, Dana Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan daerah Kerja.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidak tepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntansi ini, disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus di acui oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan

laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Semua kegiatan dan laporan keuangan berupa dana-dana yang dikeluarkan maupun dana masuk dirangkum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi setiap tahunnya.

Di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi, laporan keuangan sangat penting untuk menginformasikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut SAK-ETAP yang diputuskan berdasarkan peraturan menteri yang baru Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK-ETAP dan dijalankan secara konsisten. Selain perusahaan kecil dan menengah, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan SAK-ETAP sebagai standar akuntansinya berdasarkan peraturan pemerintah bersama IAI. Salah satu entitas tersebut ialah koperasi. Secara rinci, entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangannya yang dipersentasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2011 di Jakarta tentang implementasi SAK-ETAP, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2. Sistem Penyediaan Air Minum, PDAM
3. Koperasi dan UKM

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Neraca;

- 2) Perhitungan Hasil Usaha;
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan;

Kemudian laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yaitu :

- 4) laporan perubahan ekuitas (modal);
- 5) laporan arus kas.

Tujuan SAK-ETAP sendiri yakni memberikan kemudahan bagi entitas seperti koperasi. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditunjukkan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. Sehingga, rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas koperasi. Beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Primer Koperasi (Primkop) Kartika Benteng Emas Palembang yang berada di jalan Kiranggo Wirosantiko Ilir Barat II Palembang, telah berdiri sejak tanggal 6 November 1975 dengan anggotanya berjumlah 179 orang. Primkop Kartika Benteng Emas Palembang adalah koperasi yang mempunyai jenis usaha yaitu di bidang simpan pinjam dan penjualan dan pengadaan barang (jasa konsumen). Primkop Kartika Benteng Emas Palembang dalam laporan keuangannya hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi yang artinya belum sepenuhnya menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor penurunan pada SHU dalam laporan akhir ini dengan judul **“Evaluasi Penerapan SAK-ETAP pada Primer Koperasi Kartika Benteng Emas Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan data yang diperoleh maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk format laporan keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang ?

2. Apakah bentuk format laporan keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang telah sesuai dengan SAK-ETAP ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam laporan akhir ini dilakukan agar lebih baik, terarah dan tidak menyimpang dalam mencapai tujuan dari penulisan laporan akhir ini. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada Evaluasi Penerapan SAK ETAP Primer Koperasi Kartika Benteng Emas Palembang yang meliputi neraca, dan laporan laba rugi pada tahun 2013 – 2015.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk laporan keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang.
2. Untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP pada Primkop Kartika Benteng Emas Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Kegunaan yang akan diperoleh dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Primkop Kartika Benteng Emas terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.
2. Sebagai bahan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri Sriwijaya dan pembaca pada umumnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna mendukung penulisan Laporan Akhir yang akan dibahas, maka diperlukan metode-metode

tertentu agar didapat data-data yang objektif. Teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:137), yaitu:

1. *Interview* (Wawancara), yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
2. Kuesioner (Angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lain.

Dari penjelasan teknik pengumpulan data di atas, yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di Primkop Kartika Benteng Emas adalah menggunakan metode *Interview* (Wawancara).

1.5.1 Objek Penulisan

Objek penulisan laporan akhir ini didapat dari Primkop Kartika Benteng Emas Palembang bertempat di Jalan Kirenggo Wirosantiko Palembang.

1.5.2 Jenis Data

Jenis data cenderung pada pengertian darimana (sumbernya) data itu berasal. Berdasarkan hal itu, data tergolong menjadi dua bagian menurut Sanusi (2014:104) adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (*Primary Data*), yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Dari penjelasan jenis-jenis data berdasarkan cara di atas, penulis menggunakan data primer yang penulis peroleh berupa neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi Laporan Akhir ini maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasannya sehingga dapat dimengerti relevansinya dari satu bab ke bab yang lainnya. Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan

yang lain. Sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika dalam Laporan Akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam Laporan Akhir ini yang berasal dari literatur- literatur yang baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain, antara lain pengertian landasan dan asas, tujuan, prinsip, dan jenis-jenis. Serta standar akuntansi koperasi, gambaran umum Standar Akuntansi Keuangan- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan penyajian laporan keuangan menurut SAK-ETAP.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan keterangan mengenai keadaan umum Primkop Kartika Benteng Emas Palembang yang meliputi sejarah koperasi, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai evaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Primkop Kartika Benteng Emas Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Laporan Akhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi PRIMKOP KARTIKA BENTENG EMAS.